

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang berpotensi memunculkan keterlibatan oligarki politik sehingga memiliki kaitan dengan hak ekonomi politik bagi masyarakat adat IKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yang berasal dari organisasi advokasi masyarakat adat, AMAN Kalimantan Timur, serta organisasi lingkungan WALHI Kalimantan Timur sebagai pengamat dan pengawas pembangunan IKN, selain itu juga menggunakan studi pustaka dengan ruang lingkup teliti tentang potensi keterlibatan oligarki ekonomi dalam pembangunan IKN dan bagaimana hal tersebut berdampak pada hak ekonomi masyarakat adat sekitar. Adanya potensi keterlibatan oligarki diidentifikasi dengan teori oligarki ekonomi lokal yang dikemukakan oleh Vedi Hadiz dan Richard Robinson yang melihat bagaimana oligarki berkembang di Indonesia sejak Orde Baru, dan didukung oleh konsepsi masyarakat adat oleh Hazairin dan hak ekonomi oleh Jimly Asshiddiqie. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan oligarki dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara secara signifikan mampu berperan dalam mengatur dan mengontrol kebijakan serta sumber daya ekonomi di wilayah ibu kota, sehingga proyek pembangunan IKN cenderung memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hak ekonomi masyarakat adat. Dalam penelitian ini menyadari bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat adat dan transparansi pemerintah terkait proses pembangunan IKN sangat penting guna menghindari adanya pelanggaran hak hidup masyarakat adat.

Kata Kunci: Oligarki Ekonomi, Ibu Kota Nusantara, Hak Ekonomi, Masyarakat Adat

ABSTRACT

This research aims to find out the impact of moving the capital city of Indonesia to East Kalimantan which has the potential to bring up the involvement of political oligarchs so that it has a link to political economic rights for indigenous peoples of IKN. This research uses descriptive qualitative research methods with primary and secondary data sources. This research uses interview techniques with resource persons from indigenous peoples' advocacy organizations, AMAN East Kalimantan, and the environmental organization WALHI East Kalimantan as observers and supervisors of IKN development, while also using literature studies with a scope of research on the potential involvement of economic oligarchs in the development of IKN and how this has an impact on the economic rights of surrounding indigenous peoples. The potential involvement of oligarchs is identified with the theory of local economic oligarchy proposed by Vedi Hadiz and Richard Robinson, which looks at how oligarchs have developed in Indonesia since the New Order, and is supported by the conception of indigenous peoples by Hazairin and economic rights by Jimly Asshiddiqie. The final result of this research shows that the involvement of oligarchs in the process of developing the Capital City of the Archipelago is significantly able to play a role in regulating and controlling policies and economic resources in the capital region, so that the IKN development project tends to have a negative impact on the sustainability of the economic rights of indigenous peoples. In this study, it is realized that the involvement of indigenous peoples' participation and government transparency regarding the IKN development process is very important to avoid violations of the living rights of indigenous peoples.

Keywords: Economic Oligarchy, National Capital City, Economic Rights, Indigenous Peoples